



## **5. Urusan Perdagangan**

### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  - a) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
  - b) Pelayanan perijinan perdagangan
  - c) Fasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
  - a) Membangun jejaring dengan konsumen
  - b) Pembangunan promosi perdagangan internasional
  - c) Pelatihan manajemen ekspor impor
  - d) Fasilitasi promosi produk daerah
- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - a) Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
  - b) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
  - c) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
  - a) Pendataan dan penataan Pedagang Kaki Lima
  - b) Fasilitasi modal usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
  - c) Penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
  - d) Penataan Pedagang Kaki Lima
  - e) Pelayanan Taman Kuliner Condongcatur
  - f) Fasilitasi pembangunan tempat usaha untuk Pedagang Kaki Lima
- 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
  - a) Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana ekonomi.
  - b) Pendampingan pembangunan pasar.
  - c) Pembangunan pasar
- 6) Program Pembinaan dan Penataan pedagang pasar
  - a) Peningkatan pelayanan pedagang pasar
  - b) Pembinaan dan pendataan pedagang pasar
  - c) Pembinaan pengelola pasar desa

- d) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan pengurus paguyuban pedagang pasar.
- e) Pendataan pedagang pasar

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  - a) Pelaporan hasil monitoring barang rusak dan kadaluwarsa 4 buku, Pelaporan hasil monitoring harga sembako dan barang strategis 4 buku, Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan 6 lokasi, Pemantauan peredaran barang dan jasa di pasar tradisional dan tindak lanjut hasil pemantauan 10 pasar dan 2 lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengawasan peredaran barang dan jasa 2 kali dan Pendataan gudang dan pemanfaatannya 20 gudang. Guna mendukung pelaksanaan peningkatan pengawasan bahan berbahaya pada pangan, Pemkab. Sleman telah menerbitkan Keputusan Bupati No.063/KDH/A/2014 tentang Tim Pengawas Terpadu Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Dalam Pangan.
  - b) Pelayanan perizinan yang telah diterbitkan ( Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Toko Modern, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang ) sebanyak 1.800 ijin, Pelayanan perizinan untuk Angka Pengenal Importer (API) dan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) sebanyak 9 ijin dan Pelayanan perizinan sesuai tepat waktu 90 %.
  - c) Sosialisasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jejaring dengan eksportir 1 kali; Sosialisasi sertifikasi HKI bagi pelaku UKM, Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah, Guru SMK dan para pencipta karya seni 1 kali ; Fasilitasi stimulan pendaftaran sertifikasi Merek dan Hak Cipta 20 paket , Paten 1 paket dan stimulan pengajuan persyaratan pendaftaran sertifikasi Spesifik Indikasi Geografis (SIG) 1 paket. Beberapa produk industri rumah tangga yang telah mendapatkan fasilitasi stimulan HKI dari Pemkab. Sleman ikut berpartisipasi pada Pameran Potensi Daerah yang diselenggarakan di Kawasan Lapangan Deggung

pada tanggal 26 April sampai dengan 5 Mei 2014 maupun berbagai event pameran lainnya pada tahun 2014. Pada acara penutupan Pameran Potensi Daerah, Pemkab. Sleman telah melaksanakan *Launching* delapan (8) motif batik khas Sleman yang telah difasilitasi stimulan pendaftaran Hak Cipta. Fasilitasi sertifikasi HKI merupakan salah satu bentuk implementasi Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2010 – 2014 di Kabupaten Sleman.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- a) Fasilitasi kepesertaan UKM pada kegiatan temu jejaring dengan eksportir 20 UKM. Kegiatan temu jejaring dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan UKM yang berorientasi ekspor guna memenuhi permintaan pasar ekspor serta mendukung kesiapan UKM pada Masyarakat Ekonomi Asean.
- b) Fasilitasi pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Jakarta 21 UKM, Fasilitasi pameran IFFINA di Jakarta 4 UKM, Fasilitasi pameran produk ekspor daerah 4 UKM dan Fasilitasi peserta pameran CRAFINA 4 UKM. Kepesertaan Pemkab. Sleman pada berbagai event pameran merupakan salah satu bentuk implementasi agenda promosi daerah yang telah disusun pada bulan Januari tahun 2014.
- c) Fasilitasi kepesertaan pada pelatihan ekspor impor 20 orang dan pemantauan eksportir dan importir 60 perusahaan. Pelatihan ekspor impor dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan pengusaha tentang prosedur ekspor impor, sedangkan pemantauan eksportir dan importir di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 lebih difokuskan untuk mengetahui tingkat ketersediaan data Surat Keterangan Asal (SKA) dan data Non SKA.
- d) Fasilitasi kepesertaan Pemkab. Sleman pada AITIS Expo Tahun 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 14 – 20 April 2014 di Jakarta. Sebanyak 15 produk UKM diikutsertakan pada pameran AITIS Expo tersebut. Hasil monitoring 3 bulan pasca pameran

AITIS Expo terdapat transaksi antara 3 pelaku UKM dengan buyers dalam negeri.

- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - a) Penyusunan kajian efektifitas perda Kemitraan 1 dokumen dan Penyusunan kajian pembentukan UPTD Metrologi 1 dokumen. Hasil kajian efektifitas pelaksanaan Perda Kemitraan ditindaklanjuti dengan kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap beberapa toko modern yang belum melaksanakan ketentuan pada Perda Kemitraan secara optimal. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa penyediaan *space* di *took* modern untuk produk lokal UKM di Kabupaten Sleman belum mencapai 5 % .
  - b) Pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa 60 orang, Pelatihan bagi calon penguusaha perdagangan di Kecamatan Ngemplak, Kalasan dan Prambanan 60 peserta, Pelatihan calon pengusaha perdagangan di Desa Tridadi dan Triharjo 8 peserta, Pelatihan pengusaha perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen 60 pengusaha, Pembinaan pada usaha ritel tradisional 100 orang, Pendampingan usaha ritel di kecamatan pakem, Ngemplak, Ngaglik dan Tempel 10 UKM serta Monitoring toko modern 15 toko.
  - c) Pembuatan peta pasar 20 unit dan peta Taman Kuliner 1 unit. Peta pasar dan peta Taman Kuliner dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pasar serta Taman Kuliner di Kabupaten Sleman.
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan :
  - a) Monitoring keberadaan PKL 335 lokasi, *Updating* jumlah Pedagang Kaki Lima pada 17 kecamatan, Pembinaan terhadap 448 PKL, Penataan 362 PKL , Penataan lokasi PKL 2 lokasi dan Penataan PKL di lingkungan RS Sardjito 1 lokasi. Kegiatan pembinaan, penataan dan penataan lokasi PKL serta diikuti dengan *Updating* jumlah PKL secara periodik dilaksanakan guna

- mewujudkan pelaksanaan kebijakan penataan PKL yang rapi, bersih , sehat , hygenis dan tertib.
- b) Pembinaan PKL yang telah mendapatkan fasilitasi modal usaha 15 PKL dan Penataan PKL yang telah mendapatkan fasilitasi modal usaha 16 PKL di Kecamatan Seyegan.
  - c) Monitoring keberadaan PKL 9 kecamatan dengan Pembinaan dan penataan PKL sebanyak 4 kali untuk 135 orang.
  - d) Monitoring keberadaan PKL 5 lokasi dengan Pembinaan dan penataan PKL 40 orang di Kecamatan Moyudan.
  - e) Pelayanan pengunjung Taman Kuliner Condongcatur 12 bulan.
  - f) Pembangunan shelter Pedagang Kaki Lima 1 lokasi di Jalan PJKA Desa Tridadi , Kecamatan Sleman.
- 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
- a) Pemeliharaan bangunan 26 pasar, pembenahan instalasi listrik 15 pasar, perbaikan jalan lingkungan 1 pasar, pematangan lahan relokasi Pasar Prambanan 1 pasar, Pembuatan bangunan shelter Resto Sardjito 1 lokasi, Pemasangan paving blok, grill, pagar Pusat Kuliner Belut Godean 1 lokasi, Pembuatan pagar bumi Pasar Cebongan 1 lokasi dan Pembuatan talud lahan relokasi Pasar Prambanan 1 lokasi.
  - b) Pendampingan pembangunan pasar 3 buah (Pasar Prambanan, Pasar Godean, dan Pasar Sleman).
  - c) Pembangunan Pasar Prambanan Tahap 2 dan Pembangunan Pasar Sleman masing-masing 1 paket. Pada pemantauan akhir bulan Desember 2014, Pembangunan pasar Prambanan Tahap 2 tercapai 92 % dan Pembangunan Pasar Sleman tercapai 62 %.
- 6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar:
- a) Pelayanan pedagang pasar di 7 UPT Pelayanan Pasar dan Taman Kuliner.
  - b) Pembinaan pedagang pasar 7 UPT Pelayanan Pasar, Penataan pedagang dan tempat dagangan 7 pasar dan fasilitasi sarana perdagangan untuk pedagang yang tertata 7 pasar.

- c) Bimtek legal drafting dan proposal pembangunan pasar desa dan pelatihan penyusunan kerjasama dengan pihak lain 38 pasar desa.
- d) Pembentukan paguyuban dan pembinaan komunitas pasar 12 pasar.
- e) Penataan pedagang di luar dasaran 5 pasar.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan perdagangan rata-rata pencapaian target indikator masukan dana sebesar 85,31% dan rata-rata persentase keluaran kegiatan sebesar 98,86% yang meliputi 6 program dan 24 kegiatan.

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014, jumlah sarana perdagangan sebanyak 403 buah atau meningkat 7,18% dibandingkan dengan 376 buah pada tahun 2013.

Hasil *updating* jumlah pasar tradisional yang dikelola desa/swasta/koperasi pada tahun 2014 mencapai 47 buah meningkat 20,51% dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 39 buah. Sedangkan jumlah pasar tradisional yang dikelola Pemkab. Sleman dari 38 buah pada tahun 2013 berkurang 1 buah menjadi 37 buah pada tahun 2014. Penurunan 1 pasar tradisional, diakibatkan pengelolaan pasar hewan Tempel telah diserahkan Pemkab. Sleman kepada Pemerintah Desa Lumbungrejo, Tempel berdasarkan Surat Bupati Kepala Kepala Desa Lumbungrejo No. 143/798 tentang Alih Penggunaan Lokasi Pasar Hewan Tempel. Pengalihan penggunaan lokasi pasar hewan Tempel menyebabkan penurunan data jumlah pasar hewan yang dikelola Pemkab. Sleman pada tahun 2014 sebanyak 3 buah berkurang 1 dari tahun 2014 sebanyak 4 buah.

Jumlah usaha perdagangan menjadi 13.794 buah atau meningkat 4,97% dibandingkan dengan 13.141 buah pada tahun 2013. Jumlah usaha pergudangan menjadi 134 buah atau meningkat 5,51% dibandingkan dengan 127 buah pada tahun 2013.

Jumlah perusahaan yang berizin pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu yang mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sejumlah 13.537 perusahaan atau meningkat 4,80%, mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sejumlah 13.191 perusahaan atau meningkat 5,21%, dan mempunyai Tanda Daftar Gudang (TDG) sejumlah 134 perusahaan atau meningkat 5,51%, serta menyerap tenaga kerja usaha perdagangan sebanyak 120.045 orang atau meningkat 4,08 %.

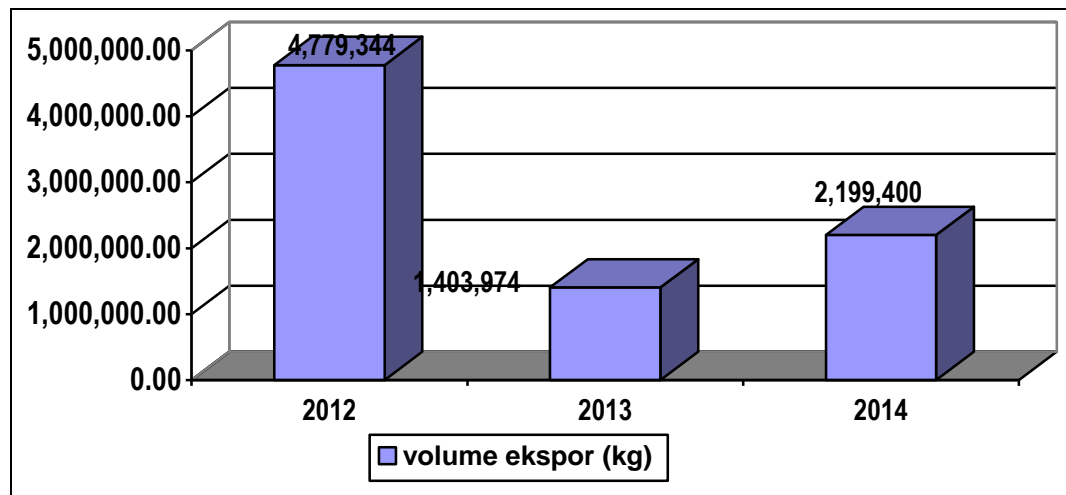
**Tabel 3.62. Perkembangan Hasil Terkait Urusan Perdagangan Tahun 2013-2014**

No.	Uraian Data	TAHUN	
		2013	2014
1	Jumlah sarana perdagangan	376	403
	a. Pasar tradisional dikelola desa/swasta/koperasi *)	39	47
	b. Pasar tradisional dikelola kabupaten *)	38	37
	c. Pasar hewan dikelola kabupaten *)	4	3
	d. Toko Modern	295	316
	1) Minimarket cab./Waralaba Nas.	152	171
	2) Toko modern lokal	133	133
	3) Pusat Perbelanjaan	2	2
	4) Perkulakan/Grosir	2	2
	5) Hypermarket	2	2
	6) Supermarket	6	6
2	Jumlah usaha perdagangan	13.141	13.794
	a. PT	1.933	2.128
	b. CV	3.787	4.054
	c. Koperasi	477	480
	d. Perorangan	6.445	6.629
	e. Badan usaha lain	499	503
3	Jumlah usaha pergudangan	127	134
4	Jumlah perusahaan yang berizin		
	a. Surat Izin Usaha Perdagangan	12.917	13.537
	b. Izin Usaha Toko Modern	0	12
	c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	0	1
	d. Tanda Daftar Perusahaan	12.538	13.191
	e. Tanda Daftar Gudang	127	134
5	Usaha ekspor		
	a. Eksportir	25	32
	b. Volume ekspor ( kg )	1.403.973,76	2.199.399,89
	c. Nilai ekspor ( US \$ )	32.415.786,53	40.976.227,96
	d. Komoditas ekspor (komoditi )	21	54
6	Usaha Impor		
	a. Importir	2	1
	b. Volume impor ( kg )	470.018,32	793.554,79
	c. Nilai impor ( US \$ )	5.347.702,74	7.318.248,88
7	Jumlah tenaga kerja usaha perdagangan (yang memiliki SIUP)	115.339	120.045

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dan Dinas Pasar

Jumlah eksportir tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan dari 25 eksportir menjadi 32 eksportir atau naik sebesar 28,00%. Volume ekspor pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 56,74% dari 1.403.973,76 kg pada tahun 2013 menjadi 2.199.399,89 kg pada tahun 2014. Nilai ekspor pada tahun 2013 senilai 32.415.786,53 US \$ meningkat sebesar 26,41% atau senilai 40.976.277,96 US \$ pada tahun 2014.

**Grafik 3.37. Perkembangan Usaha Ekspor Tahun 2012-2014**



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Jumlah pengusaha yang melaksanakan impor pada tahun 2014 sebanyak 1 importir atau menurun 50% dari 2 importir pada tahun 2013. Sedangkan volume impor pada tahun 2014 sebanyak 793.554,79 kg atau meningkat 68,72% dari 470.018,32 kg pada tahun 2013. Nilai impor juga mengalami peningkatan sebesar 36,86% dari 5.347.702,74 US \$ pada tahun 2013 menjadi 7.318.248,88 US \$ pada tahun 2014.

### c. SKPD Penyelenggara Urusan

Penyelenggara urusan perdagangan adalah Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta didukung oleh Dinas Pasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, dan 11 kecamatan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan



Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana terlampir.

**d. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perdagangan di Bidang Perdagangan berjumlah 10 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perdagangan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan sebesar Rp43.857.691.250,00 realisasi Rp33.955.015.094,00 atau 77,42%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, anggaran sebesar Rp368.399.800,00 realisasi Rp356.771.600,00 atau 96,84%.
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, anggaran sebesar Rp600.807.000,00 realisasi Rp569.032.300,00 atau 94,71%.
- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, anggaran sebesar Rp277.145.450,00 realisasi Rp265.395.450,00 atau 95,76%.
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, anggaran sebesar Rp787.773.450,00 realisasi Rp746.740.125,00 atau 94,79%.
- 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi, anggaran sebesar Rp41.133.803.800,00 realisasi Rp31.359.511.144,00 atau 76,24%.
- 6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar, anggaran sebesar Rp689.761.750,00 realisasi Rp657.564.475,00 atau 95,33%.

#### **f. Proses Perencanaan**

Pelaksanaan perencanaan urusan perindustrian dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

Proses perencanaan urusan Perdagangan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

#### **g. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perdagangan sebagaimana terlampir.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Hasil pemantauan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG Bersubsidi 3 Kg pada semua agen dan pangkalan melebihi HET yang telah ditetapkan. Kenaikan harga BBM pada pertengahan bulan Nopember 2014, harga LPG 3 kg di daerah perbatasan (Propinsi

Jawa Tengah) yang lebih tinggi serta belum diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian HET LPG di DIY sampai dengan akhir tahun 2014 memicu peningkatan pelanggaran HET LPG 3 Kg pada bulan Nopember dan Desember 2014. Solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan kegiatan pemantauan dan pengawasan peredaran barang guna meminimalisir terjadinya ketidaklancaran distribusi barang dalam pengawasan serta mendukung pemda DIY untuk mempercepat penerbitan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

- 2) Hasil beberapa kali pemantauan di lapangan masih dijumpai adanya penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk olahan pangan yang beredar dan berasal dari luar Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah lebih mengoptimalkan kegiatan pemantauan dan pengawasan bahan berbahaya pada produk olahan pangan serta lebih mengefektifkan kinerja Tim Pengawas Terpadu Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan (SK Bupati No. 063/KDH/A/2014).
- 3) Beberapa pasar tradisional di Kabupaten Sleman tidak mampu secara optimal mengakomodasi kebutuhan dan kenyamanan pedagang serta tuntutan pengunjung yang membutuhkan akses yang praktis dan nyaman dalam berbelanja. Solusi yang dilakukan adalah dengan Pembangunan 2 pasar (Pasar Prambanan Tahap 2 dan Pasar Sleman), pendampingan pembangunan 3 pasar (pasar Godean, Pasar Prambanan dan Pasar Sleman), pemeliharaan 26 bangunan pasar dan melakukan rehabilitasi beberapa 7 pasar tradisional serta pendampingan dan pembinaan kepada pedagang pasar sebanyak 7 pasar tradisional dalam penataan dagangan dan pelayanan kepada konsumen.